

## BAB V

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan bagaimana variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel – variabel bebas yang ada. Variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini adalah apakah suatu kabupaten / kota dimekarkan atau tidak. Variabel bebas yang digunakan untuk menjelaskan variabel terikat tersebut adalah PDRB Non Migas Per Kapita, Kontribusi PDRB Non Migas Kabupaten / Kota terhadap Propinsi Induknya, Rasio Konsumsi Non Makanan terhadap Konsumsi Total Rumah Tangga, besarnya Dana Alokasi Umum tiap daerah, besarnya Dana Alokasi Khusus tiap daerah, besarnya Pendapatan Asli Daerah tiap kabupaten / kota, besarnya Pendapatan Daerah Sendiri tiap kabupaten / kota, besarnya Pengeluaran Rutin tiap kabupaten / kota, Rasio penerimaan daerah sendiri terhadap pengeluaran rutin, rasio pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran rutin, rasio dana alokasi umum dan khusus terhadap pengeluaran rutin, luas wilayah, kepadatan penduduk, jumlah pengguna listrik di suatu kabupaten / kota, jumlah tenaga kerja berusia di atas 18 tahun, serta jarak dari kabupaten / kota ke pusat pemerintahan (propinsi).

Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\ln\left(\frac{Pi}{1-Pi}\right) = \beta_0 + \beta_1 \ln pdrbnmp + \beta_2 \ln kontpdrb + \beta_3 \ln nf + \beta_4 \ln dau + \beta_5 \ln dak + \beta_6 \ln pad + \beta_7 \ln pds + \beta_8 \ln pr + \beta_9 \ln area + \beta_{10} \ln density + \beta_{11} \ln lstrk + \beta_{12} \ln na\ ker + \beta_{13} \ln jrk + \beta_{14} \ln rpd spr + \beta_{15} \ln rpadpr + \beta_{16} \ln rdaudakpr$$

Model tersebut kemudian dianalisis dengan metode *logistic regression* untuk melihat berapa besar pengaruh perubahan variabel – variabel bebas terhadap peluang terjadinya variabel terikat. *Software* yang digunakan pada penelitian ini adalah Stata 8.0.

Bab ini akan menguji signifikansi dari model penelitian ini, apakah variabel – variabel bebas secara signifikan mempengaruhi variabel terikat baik secara *parsial* maupun bersama – sama. Koefisien dari hasil regresi yang didapat akan digunakan untuk melihat apakah perubahan variabel bebas memperkecil ataupun memperbesar dimekarkannya suatu daerah. Akan tetapi, nilai dari koefisien yang ada tidak dapat dijadikan alat analisa. Pada model logistik, analisa akan menggunakan nilai *odds ratio* yang ada. Nilai *odds ratio* kemudian akan digunakan untuk melihat besarnya pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

## V.1. Pengujian Model Logit

### V.1.1. Uji Signifikansi

```
Iteration 0:  log likelihood = -293.22804
Iteration 1:  log likelihood = -211.92511
Iteration 2:  log likelihood = -197.45489
Iteration 3:  log likelihood = -195.16772
Iteration 4:  log likelihood = -195.09394
Iteration 5:  log likelihood = -195.09384
```

Logit estimates	Number of obs	=	493
	LR chi2(14)	=	196.27
	Prob > chi2	=	0.0000
Log likelihood = -195.09384	Pseudo R2	=	0.3347

Berbeda dengan regresi sederhana, pada regresi dengan model logistic ini tidak akan ditemukan nilai F statistic ataupun probabilitanya. Untuk menguji signifikansi variable – variable independent secara bersama – sama terhadap variable dependen maka digunakan probabilita dari likelihood ratio. Apabila Probabilita  $< \alpha$ , maka tolak Ho. Ho yang digunakan pada uji ini adalah bahwa variabel – variabel independen secara bersama – sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Karena Probabilita dari likelihood ratio  $< \alpha$  ( $0.0000 < 0.01$ ) maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak. Dengan demikian variabel – variabel independen secara bersama – sama signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen pada tingkat keyakinan 99 %.

Untuk uji signifikansi variabel – variabel independent secara parsial, pada model regresi logistik ini digunakan z statistik. Ho yang digunakan pada uji ini adalah bahwa variabel independent yang diuji tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent. Apabila probabilita dari nilai z-nya  $< \alpha$ , maka Ho ditolak. Atau dengan kata lain apabila Ho ditolak maka variabel tersebut disimpulkan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent. Dengan menggunakan stata, secara otomatis variabel lnprdspr dibuang dari model karena menimbulkan masalah *collinearity*.

**Tabel 5.1. Rangkuman Nilai Z Statistik**

<u>Variabel</u>	<u>Zstat</u>	<u>Prob of Z stat</u>
Lnprbnmp	-3.87	0.000***
Lnkontpdrb	1.69	0.091*
Lnnf	-2.36	0.018**
Lndau	-1.74	0.083*

Lndak	-2.03	0.042**
Lnpr	2.14	0.033**
Lnpds	-0.81	0.420
Lnarea	-2.18	0.029**
Lndensity	-4.37	0.000***
Lnlstrk	2.47	0.013**
Lnnaker	2.66	0.008***
Lnjrk	1.66	0.098*
Lnrpadpr	1.76	0.078*
Lnrdaudakpr	1.75	0.080*
_cons	-4.65	0.000***

\*signifikan pada tingkat kepercayaan 90 % ( $\alpha = 0.1$ )

\*\*signifikan pada tingkat kepercayaan 95 % ( $\alpha = 0.05$ )

\*\*\*signifikan pada tingkat kepercayaan 99 % ( $\alpha = 0.01$ )

Dari tabel diatas terlihat bahwa terdapat beberapa variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dan beberapa yang tidak. Berbagai variabel independen tersebut juga signifikan pada level signifikansi yang berbeda – beda. Lima variabel independen signifikan pada tingkat kepercayaan 99 %, yaitu logpdrbnmp, kontpdrb, nf, logdensity, loglstrk. 1 variabel signifikan pada tingkat kepercayaan 95 % yaitu lognaker dan 2 variabel signifikan pada tingkat kepercayaan 90 % yaitu logarea dan rpdspr.

### V.1.2. Goodness of Fit Test

Pada model logit yang digunakan dalam penelitian ini, untuk melihat seberapa besar variasi dari variabel dependent dipengaruhi oleh variabel independent, maka digunakan count  $R^2$ . Seperti terlihat table di bawah, maka dapat disimpulkan bahwa pada model ini, variasi dari variable dependen dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 82.35 %. Hal ini berarti sebesar 17.65 % variasi dari variable dependen ini dipengaruhi oleh variable – variable lain selain variable independent yang sudah ada.

Logistic model for mekar

----- True -----			
Classified	D	~D	Total
+	85	33	118
-	54	321	375
Total	139	354	493

Classified + if predicted  $\Pr(D) \geq .5$

True D defined as mekar != 0

Sensitivity	$\Pr(+ D)$	61.15%
Specificity	$\Pr(- \sim D)$	90.68%
Positive predictive value	$\Pr(D +)$	72.03%
Negative predictive value	$\Pr(\sim D -)$	85.60%

False + rate for true ~D	$\Pr(+ \sim D)$	9.32%
False - rate for true D	$\Pr(- D)$	38.85%
False + rate for classified +	$\Pr(\sim D +)$	27.97%
False - rate for classified -	$\Pr(D -)$	14.40%

Correctly classified 82.35%

. fitstat

Measures of Fit for logit of mekar

Log-Lik Intercept Only:	-293.228	Log-Lik Full Model:	-195.094
D(478):	390.188	LR(14):	196.268
		Prob > LR:	0.000
McFadden's R2:	0.335	McFadden's Adj R2:	0.284
Maximum Likelihood R2:	0.328	Cragg & Uhler's R2:	0.472
McKelvey and Zavoina's R2:	0.608	Efron's R2:	0.387
Variance of y*:	8.393	Variance of error:	3.290
Count R2:	0.824	Adj Count R2:	0.374
AIC:	0.852	AIC*n:	420.188
BIC:	-2573.656	BIC' :	-109.461

## V.2. Analisis Koefisien

Pada model logit nilai koefisien menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan independen. Akan tetapi, analisis yang dapat dilakukan dengan nilai koefisien pada model ini terbatas pada tanda koefisien tersebut. Apabila koefisiennya bernilai positif, maka semakin tinggi nilai variabel dependen maka semakin tinggi peluang dimekarkannya suatu daerah. Sedangkan apabila koefisiennya bernilai negatif, maka semakin tinggi nilai variabel tersebut, maka peluang dimekarkannya suatu daerah menjadi semakin kecil.

Dari hasil regresi menggunakan STATA 8, maka diperoleh persamaan regresi untuk model ini sebagai berikut:

**Tabel 5.2. Koefisien Hasil Regresi**

mekar	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
lnpdrbnmp	-1.312455	.3394751	-3.87	0.000	-1.977814 - .647096
lnkontpdrb	.3286286	.1942003	1.69	0.091	-.0519969 .7092542
lnnf	-2.441707	1.032588	-2.36	0.018	-4.465542 -.4178722
lnpds	-.212463	.2636506	-0.81	0.420	-.7292088 .3042828
lnpr	10.86594	5.083495	2.14	0.033	.9024738 20.82941
ln dau	-8.65716	4.987141	-1.74	0.083	-18.43178 1.117456
ln dak	-.2286876	.112555	-2.03	0.042	-.4492913 -.008084
ln area	-.9759108	.4476251	-2.18	0.029	-1.85324 -.0985818
ln density	-1.961427	.4490964	-4.37	0.000	-2.84164 -1.081214
ln lstrk	.9963677	.4026136	2.47	0.013	.2072596 1.785476
ln naker	1.158549	.4359429	2.66	0.008	.3041161 2.012981
ln jrkr	.3478702	.2099422	1.66	0.098	-.063609 .7593493
ln rpadpr	.4601757	.2610177	1.76	0.078	-.0514095 .9717609
ln rdaudakpr	8.873092	5.061903	1.75	0.080	-1.048055 18.79424
_cons	-36.63286	7.877039	-4.65	0.000	-52.07157 -21.19414

$$\begin{aligned}
 \text{Mekar} = & -36.63286 - 1.312455 \ln \text{pdrbnmp} + 0.3286286 \ln \text{kontpdrb} - 2.441707 \ln \text{nf} - 8.65716 \ln \text{dau} \\
 & - 0.2286876 \ln \text{dak} - 0.212463 \ln \text{pds} + 10.86594 \ln \text{pr} - 0.9759108 \ln \text{area} \\
 & - 1.961427 \ln \text{density} + 0.9963677 \ln \text{lstrk} + 1.158549 \ln \text{naker} + 0.3478702 \ln \text{jrkr} + 0.4601757 \ln \text{rpadpr} \\
 & + 8.873092 \ln \text{rdaudakpr}
 \end{aligned}$$

Pada model di atas terlihat bahwa:

- Perubahan besarnya pdrb non migas per kapita berpengaruh secara negatif terhadap dimekarkannya suatu daerah. Hal ini berarti semakin sejahtera penduduk di suatu daerah maka semakin kecil peluang dimekarkannya daerah tersebut.

- Kontribusi pdrb suatu kabupaten terhadap pdrb propinsi induknya berpengaruh secara positif terhadap dimekarkannya suatu daerah. Hal ini berarti semakin besar kontribusi suatu kabupaten terhadap propinsi induknya maka semakin besar peluang daerah tersebut akan dimekarkan.
- Proporsi konsumsi rumah tangga non makanan terhadap konsumsi total berpengaruh secara negatif terhadap dimekarkannya suatu daerah. Hal ini berarti semakin sejahtera penduduk di suatu daerah maka peluang dimekarkannya daerah tersebut akan semakin kecil.
- Perubahan DAU berpengaruh secara negatif terhadap peluang dimekarkannya suatu daerah. Hal ini menandakan perubahan DAU yang diberikan pemerintah dapat memicu dimekarkannya daerah tersebut.
- Perubahan DAK berpengaruh secara negatif terhadap peluang dimekarkannya suatu daerah. Hal ini menandakan bahwa perubahan DAK yang diberikan oleh pemerintah dapat memperkecil peluang dimekarkannya suatu daerah.
- Perubahan PDS berpengaruh secara negatif terhadap peluang dimekarkannya suatu daerah. Hal ini menandakan bahwa semakin besar penerimaan suatu daerah maka peluang dimekarkannya daerah tersebut akan semakin tinggi.
- Perubahan pengeluaran rutin berpengaruh secara positif terhadap peluang dimekarkannya suatu daerah. Hal ini menandakan bahwa semakin besar pengeluaran rutin suatu daerah maka semakin tinggi peluang dimekarkannya suatu daerah.
- Perubahan area berpengaruh secara negatif terhadap peluang dimekarkannya suatu daerah. Hal ini berarti semakin besar area daerah tersebut maka akan semakin kecil peluang daerah tersebut untuk dimekarkan.



- Perubahan kepadatan penduduk berpengaruh secara negatif terhadap peluang dimekarkannya suatu daerah. Hal ini berarti semakin tinggi kepadatan penduduk di suatu daerah maka semakin kecil peluang daerah tersebut untuk dimekarkan.
- Perubahan jumlah pengguna listrik di suatu daerah berpengaruh secara positif terhadap peluang dimekarkannya suatu daerah. Hal ini berarti semakin tinggi pengguna listrik, atau dapat dikatakan semakin sejahtera penduduk, di suatu daerah maka peluang dimekarkannya suatu daerah menjadi semakin tinggi juga.
- Perubahan jumlah tenaga kerja di atas 18 tahun di suatu daerah berpengaruh secara positif terhadap dimekarkannya suatu daerah. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah tenaga kerja di suatu daerah maka peluang suatu daerah untuk dimekarkan menjadi semakin tinggi juga.
- Perubahan jarak dari kabupaten ke pusat kota (propinsi) berpengaruh secara positif terhadap peluang dimekarkannya suatu daerah. Hal ini berarti semakin jauh jarak antara kabupaten ke pusat kota (propinsi) maka semakin tinggi peluang daerah tersebut untuk dimekarkan.
- Rasio PAD terhadap pengeluaran rutin berpengaruh secara positif terhadap peluang dimekarkannya suatu wilayah. Hal ini berarti semakin besar potensi suatu daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin di daerah tersebut maka akan semakin kecil peluang daerah tersebut untuk dimekarkan.
- Rasio besar dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap peluang dimekarkannya suatu daerah berpengaruh secara positif terhadap peluang daerah untuk dimekarkan. Hal ini berarti semakin besar ketergantungan suatu daerah untuk

membayai pengeluaran rutinnya terhadap transfer dari pusat maka akan semakin tinggi peluang daerah tersebut untuk dimekarkan.

### V.3. Analisa Odds Ratio

*Odds ratio* diartikan sebagai rasio peluang terjadinya suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi lainnya. Pada penelitian ini besarnya *odd ratio* dapat dikatakan sebagai peluang dimekarkannya suatu daerah. *Odds* diperoleh dari  $\exp(\beta)$  yang menunjukkan besarnya *factor change in odds for unit increase in x*. Output yang dihasilkan STATA 8.0 untuk nilai odds ratio adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3. Nilai Odds Ratio Hasil Regresi**

mekar	Odds Ratio	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
lnpdrbnmp	.2691585	.0913726	-3.87	0.000	.1383714 .523564
lnkontpdrb	1.389062	.2697562	1.69	0.091	.9493318 2.032475
lnnf	.0870122	.0898477	-2.36	0.018	.0114985 .6584464
lnpds	.8085902	.2131853	-0.81	0.420	.4822904 1.355652
lnpr	52362.19	266182.9	2.14	0.033	2.465695 1.11e+09
lndau	.0001739	.0008672	-1.74	0.083	9.89e-09 3.057067
lndak	.795577	.0895461	-2.03	0.042	.6380802 .9919486
lnarea	.376849	.168687	-2.18	0.029	.1567286 .9061216
lndensity	.1406575	.0631688	-4.37	0.000	.0583299 .3391834
lnlstrk	2.708426	1.090449	2.47	0.013	1.230302 5.962416
lnnaker	3.185307	1.388612	2.66	0.008	1.355426 7.485598
lnjrk	1.416048	.2972883	1.66	0.098	.9383719 2.136885
lnrpadpr	1.584352	.4135439	1.76	0.078	.9498896 2.642594
lnrdaudakpr	7137.319	36128.41	1.75	0.080	.3506192 1.45e+08

Interpretasi dari *odd ratio* di atas adalah sebagai berikut:

- Peningkatan perubahan pdrb non migas perkapita di suatu daerah menyebabkan peluang daerah tersebut untuk dimekarkan turun sebesar 0.2691585 kali.
- Peningkatan perubahan kontribusi pdrb suatu kabupaten terhadap propinsi induknya menyebabkan peluang daerah tersebut untuk dimekarkan naik sebesar 1.389062 kali.
- Peningkatan perubahan proporsi konsumsi non food terhadap konsumsi rumah tangga total menyebabkan peluang daerah tersebut untuk dimekarkan turun sebesar 0.0870122.
- Peningkatan perubahan DAU yang diterima suatu daerah menyebabkan peluang daerah tersebut untuk dimekarkan turun sebesar 0.0001739 kali.
- Peningkatan perubahan DAK yang diterima suatu daerah menyebabkan peluang daerah tersebut untuk dimekarkan turun sebesar 0.795577 kali.
- Peningkatan perubahan PR suatu daerah menyebabkan peluang daerah tersebut untuk dimekarkan naik sebesar 52362.19 kali.
- Peningkatan perubahan PDS suatu daerah menyebabkan peluang daerah tersebut untuk dimekarkan turun sebesar 0.8085902 kali.
- Peningkatan perubahan area di suatu daerah menyebabkan peluang daerah tersebut untuk dimekarkan turun sebesar 0.4621881 kali.
- Peningkatan perubahan kepadatan penduduk di suatu daerah menyebabkan peluang daerah tersebut untuk dimekarkan turun sebesar 0.1406575 kali.
- Peningkatan perubahan jumlah penduduk pengguna listrik di suatu daerah menyebabkan peluang daerah tersebut untuk dimekarkan naik sebesar 2.708426 kali.

- Peningkatan jumlah tenaga kerja berusia di atas 18 tahun menyebabkan peluang daerah tersebut untuk dimekarkan naik sebesar 3.185307 kali.
- Peningkatan jarak antara kabupaten dengan pusat kota (propinsi) menyebabkan peluang suatu daerah untuk dimekarkan naik sebesar 1.416048 kali.
- Peningkatan rasio PAD terhadap PR di suatu daerah menyebabkan peluang daerah tersebut untuk dimekarkan naik sebesar 1.584352 kali.
- Peningkatan rasio DAU dan DAK terhadap pengeluaran rutin suatu daerah menyebabkan peluang daerah tersebut untuk dimekarkan naik sebesar 7137.319 kali.

#### **V.4. Analisa Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat**

Berdasarkan koefisien dan nilai dari *odds ratio* yang didapat dengan metode *logistic regression*, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dikategorikan sebagai berikut. Variabel – variabel bebas dapat berpengaruh secara positif maupun negatif terhadap variabel terikat.

Variabel yang berpengaruh positif terhadap pemekaran wilayah diantaranya adalah kontribusi PDRB Non Migas Kabupaten / Kota terhadap PDRB Non Migas propinsi induknya, besarnya Pengeluaran Rutin suatu kabupaten / kota, jumlah pelanggan listrik, jumlah tenaga kerja berusia di atas 18 tahun yang tersedia, jarak antara kabupaten / kota terhadap pusat pemerintahan (propinsi), rasio pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran rutin daerah tersebut, serta rasio dana alokasi umum dan alokasi khusus terhadap pengeluaran rutin suatu daerah. Pengaruh positif ini berarti kenaikan variabel – variabel ini memperbesar peluang dimekarkannya suatu wilayah.

Variabel yang berpengaruh negatif terhadap pemekaran wilayah diantaranya adalah PDRB Non Migas Per Kapita, rasio konsumsi *non food* terhadap konsumsi total, besarnya dana alokasi umum, besarnya dana alokasi khusus, luas wilayah, serta kepadatan penduduk. Pengaruh negatif ini berarti perubahan variabel – variabel tersebut akan memperkecil peluang dimekarkannya suatu daerah.

Besarnya pengaruh masing – masing variabel bebas ini terlihat dari nilai *odds ratio* yang dijelaskan di atas. Pengaruh positif terbesar adalah besarnya rasio jumlah dana alokasi umum dan alokasi khusus terhadap pengeluaran rutin di suatu daerah serta besarnya pengeluaran rutin di suatu daerah. Sedangkan pengaruh positif terkecil adalah kontribusi PDRB Non Migas Kabupaten / Kota terhadap PDRB Non Migas propinsi induknya dan jarak antara kabupaten / kota terhadap pusat pemerintahan (propinsi). Pengaruh negatif terbesar adalah besarnya dana alokasi khusus dan luas wilayah suatu daerah. Sedangkan pengaruh negatif terkecil adalah besarnya dana alokasi umum dan rasio konsumsi *non food* terhadap konsumsi total penduduk di suatu wilayah.

#### **V.4.1. Pengaruh Negatif Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita**

Berdasarkan hasil regresi di atas, terlihat bahwa peningkatan PDRB Non Migas Per Kapita menyebabkan peluang untuk dimekarkannya suatu daerah menjadi lebih kecil. PDRB Non Migas Per Kapita menunjukkan seberapa besar tingkat kesejahteraan penduduk serta tingkat produktivitas sebuah kabupaten / kota. Semakin sejahtera suatu daerah, maka daerah semakin *reluctant* untuk dimekarkan. Semakin sejahtera, maka penduduk di daerah tersebut merasa sudah cukup puas dengan kondisi yang ada sehingga tidak perlu lagi untuk dimekarkan. Justru apabila dimekarkan, maka akan ada daerah – daerah yang merasa tidak mendapat potensi yang cukup sehingga kesejahteraannya justru akan turun.

Pemekaran wilayah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di daerah tersebut antara lain dengan peningkatan kualitas pengelolaan potensi di daerah tersebut. Semakin meningkat PDRB, maka dapat dikatakan semakin efektif peran daerah dalam menghasilkan output dari potensi yang ada. Sehingga apabila PDRB Non Migas per kapita di suatu daerah rendah, maka dapat muncul ketidakpuasan dari masyarakat sehingga memicu pemekaran wilayah.

#### **V.4.2. Pengaruh Positif Kontribusi PDRB Kabupaten / Kota Terhadap Propinsi Induknya**

Berdasarkan hasil regresi di atas, terlihat bahwa semakin tinggi kontribusi suatu kabupaten / kota terhadap propinsi induknya maka peluang dimekarkannya daerah tersebut akan semakin tinggi. Hasil ini sebenarnya lebih tepat digunakan untuk pembahasan pemekaran wilayah di tingkat propinsi. Ketika kontribusi PDRB suatu kabupaten / kota terhadap propinsi induknya makin besar, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut akan memilih untuk melepaskan diri dari propinsi tersebut. Semakin tinggi kontribusi PDRB, maka dapat dikatakan semakin tinggi juga PDRB daerah tersebut dibanding kabupaten / kota di propinsi tersebut. Dengan demikian semakin besar juga potensi daerah tersebut. Dengan besarnya potensi daerah tersebut maka daerah akan memilih untuk mekar sehingga daerah tersebut memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola potensi yang ada.

Ketika masih berupa kabupaten, maka pendapatan daerah terutama yang berasal dari pajak masih harus dibagi ke propinsi induk dan juga kabupaten / kota lain dalam propinsi induknya. Apabila daerah tersebut mekar dan membentuk propinsi sendiri, maka penerimaan daerah tersebut juga akan lebih tinggi. Hal ini lah yang akhirnya mendasari daerah untuk

memekarkan diri seperti yang terjadi dengan kasus pemekaran propinsi Banten dan Kepulauan Riau.

#### **V.4.3. Pengaruh Negatif Proporsi Konsumsi Non Food terhadap Konsumsi Total**

Konsumsi non makanan menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Semakin sejahtera masyarakat maka akan semakin tinggi juga tingkat konsumsi non makanannya. Tingkat konsumsi penduduk dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah biasanya lebih banyak dihabiskan untuk konsumsi makanan. Hal ini memang relevan karena makanan adalah salah satu konsumsi primer yang tidak mungkin dihindarkan. Salah satu bukti bahwa penduduk berpendapatan rendah biasanya menghabiskan pendapatannya untuk konsumsi makanan terlihat dari kecenderungan penggunaan BLT yang disalurkan pemerintah sebagai dana kompensasi kenaikan BBM. Masih banyak juga kita dengar masyarakat yang harus makan nasi aking untuk menyambung hidup akibat kenaikan BBM. Tentu masyarakat yang berpendapatan rendah, yang tentunya juga kurang sejahtera, tidak akan sanggup untuk membeli barang – barang mewah ataupun untuk menabung. Maka dari itu, apabila penduduk yang ada di suatu daerah lebih banyak mengkonsumsi *non food* terhadap konsumsi totalnya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di daerah tersebut cukup sejahtera.

Berdasarkan hasil regresi sebelumnya, disimpulkan bahwa semakin tinggi proporsi konsumsi non food terhadap konsumsi total maka peluang dimekarkannya daerah tersebut akan semakin rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin sejahtera penduduk di suatu daerah maka penduduk di daerah tersebut merasa sudah cukup puas dengan kondisinya. Sejalan dengan tujuan pemekaran daerah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, maka ketika penduduk di suatu daerah sudah maju tidak perlu lagi daerah tersebut dimekarkan.

#### **V.4.4. Pengaruh Positif Pengeluaran Rutin Daerah**

Berdasarkan hasil regresi sebelumnya, semakin tinggi pengeluaran rutin di suatu daerah maka akan semakin tinggi peluang dimekarkannya daerah tersebut. Semakin tinggi pengeluaran rutin daerah maka jumlah aparatur pemerintahan di daerah juga semakin tinggi. Tingginya jumlah aparatur pemerintahan dapat dijadikan indikator ketidakefisienan kinerja pemerintah daerah. Maka dari itu, hal ini dapat menjadi pemicu suatu daerah untuk dimekarkan.

Ketidakefisienan kinerja aparatur pemerintahan daerah biasanya dikaitkan dengan *high cost economy* dan tidak optimalnya tingkat investasi di daerah tersebut. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah menerbitkan perda – perda sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing – masing daerah. Tidak jarang perda yang diterbitkan ini justru mendistorsi perekonomian di daerah tersebut sehingga pada akhirnya tidak berhasil meningkatkan pendapatan di daerah tersebut.

Ketidakefisienan inilah yang memicu daerah untuk memekarkan diri. Dengan memekarkan diri, maka diharapkan pemerintah daerah dapat lebih efisien. Dengan efisiensi terutama di bidang pemerintahan maka diharapkan juga perekonomian di daerah tersebut dapat lebih maju. Majunya perekonomian, baik melalui investasi daerah maupun pengelolaan sumber daya yang ada secara lebih efisien, pada akhirnya akan mensejahterakan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini sesuai dengan tujuan dari pemekaran wilayah.

#### **V.4.5. Pengaruh Negatif Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum diberikan kepada seluruh daerah baik tingkat propinsi maupun kabupaten / kota. Berdasarkan hasil regresi, semakin tinggi DAU yang diterima daerah maka semakin kecil peluang dimekarkannya daerah tersebut. Atau dengan kata lain apabila DAU



yang diterima semakin rendah maka peluang daerah tersebut untuk dimekarkan menjadi semakin tinggi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya transfer dari pemerintah pusat kepada daerah berpengaruh secara signifikan terhadap dimekarkannya suatu wilayah. Dengan adanya transfer ini, daerah semakin berlomba – lomba untuk mendapatkan transfer antara lain dengan membentuk daerah baru. Apabila DAU yang diterima suatu daerah sudah tinggi maka tidak menjadi alasan bagi daerah tersebut untuk memisahkan diri. Karena terdapat resiko ketika suatu daerah menjadi sebuah daerah baru, maka DAU yang diterima menjadi lebih kecil sehingga justru membuat daerah baru tersebut kurang berkembang.

Pemerintah menetapkan sepertiga dari total penerimaan negara dialokasikan untuk Dana Alokasi Umum (DAU). DAU dibagikan keseluruh provinsi, kabupaten, dan kota berdasarkan kriteria dan mekanisme yang telah ditetapkan. Bertambahnya jumlah provinsi, kabupaten dan kota akan memperbesar pembagian total DAU sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 5.4. Rata-Rata Penerimaan DAU Kabupaten / Kota (miliar Rp)**

<b>Tahun</b>	<b>DAU Nasional</b>	<b>DAU Kab/Kota (90% DAU Nasional)</b>	<b>Kenaik-an DAU (%)</b>	<b>Jumlah Kabupaten/Kota Penerima DAU</b>	<b>Kenaik-an Jumlah Daerah (%)</b>	<b>Rata-Rata Penerimaan DAU</b>
2001	60,516.70	54,465.03	-	336	-	162.10
2002	69,114.10	62,202.69	14.21	348	3.57	178.74
2003	76,978.00	69,280.20	11.38	30	6.32	187.24

2004	82,130.94	73,917.85	6.69	410	10.81	180.29
2005	88,765.60	79,889.04	8.08	434	5.85	184.08
2006	145,664.20	131,097.78	64.10	434	-	302.07
2007	164,787.40	148,308.66	13.13	434	-	341.73

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan RI, 2007.

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata jumlah DAU yang dibagikan ke tiap daerah justru menurun pada tahun 2004 dan 2005 dibandingkan tahun 2003. Pemekaran daerah secara besar – besaran terjadi sejak tahun 2001 sampai 2003 sehingga efeknya paling terasa pada tahun anggaran 2004. Oleh karena itu, jika pemekaran daerah (provinsi, kabupaten, kota) terus berkelanjutan, implikasinya DAU yang dibagi ke tiap pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) akan semakin berkurang. Rata-rata penerimaan DAU pada Tahun 2006 dan 2007 naik kembali karena jumlah daerah kabupaten/kota penerima DAU tetap.

#### **V.4.6. Pengaruh Negatif Dana Alokasi Khusus**

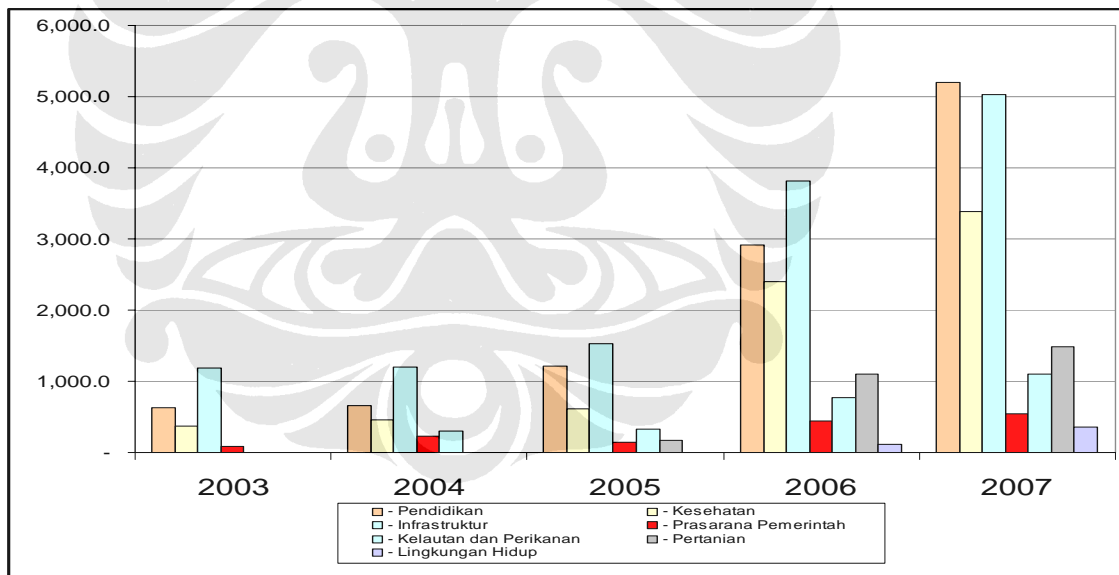
Dana Alokasi Khusus diberikan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan di seluruh wilayah di Indonesia. Dengan adanya desentralisasi bukan berarti seluruh tanggung jawab dan kewenangan diberikan secara penuh kepada pemerintah daerah. Maka dari itu, untuk mewujudkan target – target pemerintah pusat, diberikanlah DAK.

Berdasarkan hasil regresi, semakin tinggi jumlah DAK maka akan memperkecil peluang daerah tersebut untuk dimekarkan menjadi semakin kecil. Semakin besar DAK yang diterima maka berarti pemerintah sudah memberikan perhatian yang cukup besar kepada daerah tersebut. Pemekaran wilayah dapat dipicu oleh ketidakpuasan daerah karena kurangnya

perhatian pemerintah. Dengan demikian apabila DAK yang diterima sudah cukup besar, maka daerah sudah tidak perlu dimekarkan lagi.

Seperti yang terlihat pada gambar di bawah, DAK yang diterima oleh daerah biasanya untuk mencapai sasaran – sasaran pemerintah pusat terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, infrastruktur, prasarana pemerintahan, serta pertanian. Maka dari itu, semakin besar DAK yang diterima oleh pemerintah maka semakin besar perhatian pemerintah pusat terhadap daerah tersebut. DAK biasanya digunakan untuk meningkatkan pemerataan serta kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi DAK berarti semakin sejahtera masyarakat.

**Gambar 5.1. Alokasi DAK 2003 – 2007 Per Bidang**



Sumber: Departemen Keuangan

#### V.4.7. Pengaruh Negatif Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan hasil regresi sebelumnya, semakin besar perubahan luas wilayah maka semakin kecil peluang suatu daerah untuk dimekarkan. Hal ini juga sejalan dengan perubahan

kepadatan penduduk di suatu wilayah. Semakin padat penduduk di suatu daerah maka akan semakin kecil peluang daerah tersebut untuk dimekarkan.

Hal ini sejalan dengan adanya *economies of scale*. Apabila sebuah daerah yang luas dan jarang penduduknya maka daerah tersebut akan sulit untuk berkembang. Walaupun SDA yang ada di daerah tersebut cukup besar, akan tetapi SDM juga sangat diperlukan. Maka dari itu, untuk daerah dengan karakteristik luas dan tidak padat lebih baik untuk tidak dimekarkan. Apabila daerah tersebut tidak dimekarkan maka penyediaan barang publik dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. *Economies of scale* juga memungkinkan barang publik disediakan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Ketika suatu daerah dimekarkan, maka daerah tersebut harus bisa menyediakan barang publik kepada penduduknya sendiri. Untuk daerah yang belum berkembang, penyediaan barang publik secara mandiri akan lebih mahal. Sehingga hal ini akan menyebabkan kesejahteraan masyarakat menjadi turun.

Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah pada dasarnya bertujuan agar penyediaan barang publik dapat lebih efektif dan barang publik dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat di suatu daerah. Maka dari itu, pemekaran wilayah bukan menjadi jalan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan barang publik yang efektif dan efisien.

#### **V.4.8. Pengaruh Positif Jumlah Pengguna Listrik di Suatu Wilayah**

Berdasarkan hasil regresi yang ada, semakin tinggi jumlah pengguna listrik di suatu wilayah maka peluang dimekarkannya suatu wilayah akan semakin tinggi. Dengan adanya listrik maka aliran informasi dan komunikasi di suatu wilayah akan semakin lancar. Dengan lancarnya informasi dan komunikasi ini, maka pengaruh eksternal dapat masuk dengan mudah ke daerah tersebut. Maka dari itu, penduduk dapat lebih mudah terprovokasi isu – isu menyangkut daerah tersebut seperti ketimpangan daerah ataupun janji – janji akan

peningkatan kesejahteraan apabila daerah tersebut dimekarkan. Dengan adanya listrik juga dapat menyebabkan suatu daerah merasa mampu untuk mengelola daerahnya sendiri. Hal ini pada akhirnya dapat memicu adanya pemekaran wilayah.

#### **V.4.9. Pengaruh Positif Jumlah Tenaga Kerja Berusia 18 Tahun ke Atas**

Berdasarkan hasil regresi sebelumnya, semakin besar jumlah tenaga kerja berusia 18 tahun ke atas maka peluang dimekarkannya suatu wilayah akan lebih besar. Besarnya jumlah tenaga kerja menandakan besarnya SDM yang ada di daerah tersebut. SDM sangat dibutuhkan untuk mengelola seluruh potensi daerah yang ada. Sebesar apapun potensi yang ada di suatu daerah menjadi tidak berguna apabila tidak dilengkapi dengan SDM baik dalam segi kualitas maupun kuantitas.

Ketika SDM yang ada dirasakan cukup besar, maka daerah merasa mampu mengelola potensi daerah yang ada dengan SDM tersebut dengan lebih efisien. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada dasarnya bertujuan agar penyediaan barang publik dapat sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. Otonomi daerah juga menekankan pengelolaan daerah yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik masing – masing daerah. Dengan banyaknya SDM yang tersedia di suatu daerah, maka daerah tersebut dapat mengelola potensi yang ada dengan SDM yang tersedia tanpa membutuhkan SDM dari daerah lain. Efisiensi pengelolaan potensi daerah dengan SDM yang ada pada akhirnya akan meningkatkan PDRB daerah pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

#### **V.4.10. Pengaruh Positif Jarak Antara Kabupaten ke Pusat Pemerintahan (Propinsi)**

Berdasarkan hasil regresi sebelumnya, semakin jauh jarak dari suatu kabupaten ke pusat pemerintahan (propinsi) maka akan semakin besar peluang daerah tersebut untuk

dimekarkan. Hal ini berhubungan dengan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di suatu daerah. Setiap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat harus diteruskan kepada daerah. Berbagai kebijakan juga membutuhkan koordinasi antara kabupaten / kota dengan kabupaten / kota lain ataupun dengan propinsi induknya. Kebijakan yang diambil oleh tiap kabupaten / kota juga harus dikomunikasikan kepada propinsi induk maupun kabupaten / kota lain dalam satu propinsi induknya sehingga kebijakan tersebut dapat sejalan dan sesuai dengan target awalnya.

Apabila jaraknya cukup jauh maka koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah di atasnya akan berjalan dengan tidak efektif. Hal ini tentu berpengaruh dengan setiap kebijakan yang diambil oleh suatu daerah. Perencanaan suatu program dapat menjadi berlarut – larut dan implementasi dari program yang sudah ada akan menjadi tidak efisien.

Maka dari itu, semakin jauh jarak dari kabupaten / kota ke pusat pemerintahan (propinsi) maka peluang daerah tersebut untuk dimekarkan menjadi semakin tinggi. Ketika dimekarkan, maka diharapkan jarak antara kabupaten / kota ke propinsi menjadi lebih dekat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih efisien dan efektif.

#### **V.4.11. Pengaruh Positif Rasio Penerimaan Asli Daerah dengan Pengeluaran Rutin Daerah**

Berdasarkan hasil regresi sebelumnya, kenaikan rasio penerimaan asli daerah dengan pengeluaran rutin daerah akan menyebabkan peluang dimekarkannya suatu daerah menjadi lebih besar. Rasio PAD dengan PR menunjukkan tingkat kemandirian suatu wilayah. Seberapa besar daerah mampu membiayai pengeluaran rutin daerahnya dengan potensi yang ada di daerah tersebut. Kenaikan rasio PAD dengan PR menunjukkan bahwa daerah tersebut akan semakin mandiri secara finansial. Daerah semakin tidak bergantung pada pemerintah pusat

karena apabila pemerintah pusat tidak lagi memberikan transfer dana kepada pemerintah daerah maka daerah masih mampu setidaknya untuk membiayai pengeluaran rutinnya dengan potensi yang ada.

Dengan kemandirian ini, maka daerah cenderung untuk memekarkan diri karena merasa mampu untuk mengelola potensi yang ada sendiri. Pengelolaan potensi daerah secara lebih mandiri oleh daerah dianggap dapat lebih memaksimalkan potensi yang ada sehingga kesejahteraan masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Daerah merasa lebih mengerti potensi yang ada sehingga mampu mengelola dengan lebih efektif dan efisien. Daerah juga merasa akan lebih maju dengan potensi daerah yang ada.

#### **V.4.12. Pengaruh Positif Rasio DAU dan DAK dengan Pengeluaran Rutin**

Berdasarkan hasil regresi yang ada, kenaikan rasio jumlah DAU dan DAK terhadap pengeluaran rutin menyebabkan peluang dimekarkannya suatu daerah menjadi lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa DAU dan DAK secara signifikan berpengaruh terhadap pembiayaan pengeluaran pemerintah di suatu daerah. Nilai rasio DAU DAK terhadap Pengeluaran Rutin di daerah tersebut menunjukkan tingkat kebergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi DAU dan DAK maka semakin tergantung daerah kepada transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini menyebabkan daerah akan memilih untuk memekarkan diri dengan harapan mendapatkan transfer dari pemerintah.

Pada era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah memberikan transfer kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari pelimpahan wewenang dan tugas dari pemerintah pusat kepada daerah. Sesuai dengan UU No. 34 tahun 2004 mengenai keuangan daerah, pemerintah pusat memberikan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagai

bentuk pengalihan tugas dan wewenang kepada pemerintah daerah serta untuk mewujudkan pemerataan antar daerah di Indonesia.

Maka dari itu, ketika pemerintah daerah semakin tergantung pada transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran rutinnya maka daerah cenderung tidak bisa lepas dari pemerintah pusat. Daerah kemudian cenderung untuk memekarkan diri sehingga daerah terus mendapat transfer berupa DAU DAK untuk membiayai pengeluaran rutinnya.

### V.5. Perkembangan Daerah Pasca Proses Pemekaran

Berdasarkan data empiris dari perkembangan kabupaten / kota yang telah dimekarkan, ternyata secara rata – rata besar bagian PDRB Non Migas Daerah Otonom Baru terhadap daerah induknya semakin menurun. Hal ini terlihat pada tabel 5.5 di bawah.

**Tabel 5.5**  
**Perkembangan Rata – Rata PDRB Non Migas Kabupaten / Kota**  
**yang Mengalami Pemekaran tahun 2002**

Tahun	2000	2001	2002	2003	2004	2005
<b>Daerah Induk</b>	1,226,810.99	1,387,578.66	1,579,120.53	1,739,855.83	1,960,495.76	2,325,388.21
<b>Daerah Otonom Baru</b>	460525.3462	517476.8569	576877.4445	634263.5022	698076.4186	791014.9028
<b>DOB/Daerah Induk</b>	37.5384105	37.29351521	36.53156519	36.45494584	35.6071374	34.01646657

Sumber: BPS

Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa sebelum terjadinya pemekaran, yaitu pada tahun 2000 dan 2001, bagian PDRB Non Migas Daerah Otonom Baru terhadap Daerah Induknya sebesar 37.5 % walaupun sedikit mengalami penurunan menjadi 37.3 % pada tahun 2001. Setelah terjadinya penurunan, maka besarnya bagian PDRB Non. Migas DOB terhadap daerah induknya menjadi semakin menurun dengan tingkat penurunan yang makin cepat sebelum terjadinya pemekaran. Hal ini berarti produktivitas DOB belum baik dibandingkan Daerah induknya. Hal ini juga dapat dijadikan indikator bahwa kegiatan perekonomian di



DOB belum berjalan efektif dan efisien. DOB tidak mengalami perkembangan namun semakin tertinggal dari daerah induknya. Hal ini berarti juga bahwa tujuan pemekaran, untuk memajukan perekonomian daerah dengan pengelolaan yang lebih efisien, belum tercapai. Kegiatan perekonomian di DOB justru makin tertinggal dari daerah induknya.

**Tabel 5.6. Perkembangan Rata – Rata Pertumbuhan (%) Kabupaten / Kota Yang Mengalami Pemekaran tahun 2002**

Tahun	2001	2002	2003	2004	2005
Daerah Induk	12.76459111	13.32875603	9.417354196	11.95899173	16.65351697
Daerah Otonom Baru	12.714751	11.79432519	10.73639703	10.84690881	11.80012837
Daerah Induk - DOB	0.049840114	1.534430837	-1.31904284	1.112082918	4.853388596

Sumber: BPS

Sejalan dengan pembahasan dari sisi PDRB Non Migas, perkembangan pertumbuhan daerah – daerah tersebut menghasilkan hasil yang sedikit berbeda. Sebelum terjadinya pemekaran, growth di DOB mengalami penurunan, bertolak belakang dengan pertumbuhan perekonomian di daerah induknya. Setahun setelah dimekarkan, atau pada tahun 2003, baik daerah induk maupun DOB mengalami penurunan pertumbuhan. Penurunan ini merupakan dampak secara langsung maupun tidak langsung dari terjadinya pemekaran. Merujuk pada tabel sebelumnya dimana besar PDRB Non Migas selalu mengalami peningkatan sedangkan rata – rata pertumbuhan justru menurun, ini berarti pemekaran wilayah di Indonesia tidak terjadi hanya berdasarkan motif ekonomi untuk mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Daerah yang mengalami nilai pertumbuhan yang negatif adalah Aceh Tenggara dan Aceh Barat. Mayoritas daerah lainnya juga mengalami penurunan pertumbuhan walaupun tidak terlalu signifikan. Di saat daerah – daerah lain mengalami penurunan pertumbuhan, daerah Barito Utara, Barito Selatan, dan Luwu justru mengalami peningkatan.

Setelah terjadi penurunan pada tahun 2003, pada tahun 2004 pertumbuhan baik di daerah induk maupun DOB mengalami peningkatan. Akan tetapi, peningkatan pertumbuhan di daerah induk lebih tinggi dibandingkan dengan DOB. Hal ini dapat ditunjukkan dengan perbedaan tingkat pertumbuhan yang makin lebar dari tahun 2004 ke 2005. Sejalan dengan analisis dari besaran PDRB Non Migas, perekonomian di DOB semakin tertinggal oleh daerah induknya.

Lebih jelas mengenai perbedaan pertumbuhan antara Daerah Induk dengan DOB dapat dijelaskan dengan tabel berikut.

**Tabel 5.7.**  
**Perkembangan Rata – Rata Bada Pertumbuhan Kabupaten / Kota**  
**Yang Dimekarkan tahun 2002**

<b>Tahun</b>	<b>2001 - 2002</b>	<b>2002 – 2003</b>	<b>2003 - 2004</b>	<b>2004 - 2005</b>
<b>Daerah Induk</b>	0.564164915	-3.91140183	2.541637534	4.694525235
<b>Daerah Otonom Baru</b>	-0.92042581	-1.05792816	0.110511779	0.953219557

Sumber: BPS

Dari tabel di atas, terlihat jelas bahwa percepatan pertumbuhan daerah otonom baru tidak lebih baik dibandingkan daerah induknya. Pada tahun 2002 ke 2003 memang terjadi perlambatan pertumbuhan baik di daerah induk maupun di DOB. Perlambatan ini terjadi secara langsung maupun tidak langsung akibat terjadinya pemekaran. Baik daerah induk maupun DOB berusaha untuk memaksimalkan potensi daerah yang ada untuk memajukan perekonomian masing – masing. Akan tetapi setelah seluruh daerah dapat beradaptasi dengan keadaan baru akibat pemekaran, daerah induk mengalami percepatan pertumbuhan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan DOB. DOB belum dapat memaksimalkan potensi daerahnya dengan baik sehingga pertumbuhan yang dicapai kurang maksimal.

Di samping sisi kegiatan ekonominya, pemekaran wilayah juga identik dengan usaha untuk memperoleh transfer dari pemerintah pusat berupa DAU yang semakin besar. Hal ini terlihat dari beberapa contoh Kabupaten / Kota yang terlihat dalam tabel berikut.

**Tabel 5.8.**

**Perkembangan DAU Kabupaten / Kota yang Dimekarkan Pada Tahun 2002**

	2001	2002	2003	2004	2005
<b>Aceh Selatan</b>	<b>137132.31</b>	<b>137350.00</b>	<b>114250.00</b>	128694.26	145661.00
Aceh Barat Daya				81031.65	103201.00
				<b>209725.91</b>	<b>248862.00</b>
<b>Padang Pariaman</b>	<b>132286.38</b>	<b>171750.00</b>	171870.00	195136.43	197236.00
Pariaman			30120.00	70578.00	95973.00
			<b>201990.00</b>	<b>265714.43</b>	<b>293209.00</b>
<b>Musi Banyuasin</b>	<b>248177.14</b>	<b>249920.00</b>	136100.00	145336.00	145336.00
Banyuasin			154706.00	176030.83	210948.00
			<b>290806.00</b>	<b>321366.83</b>	<b>356284.00</b>
<b>Kab. Bima</b>	<b>185936.31</b>	<b>207740.00</b>	164650.00	176678.00	203508.00
Kota. Bima			59700.00	89224.64	118169.01
			<b>224350.00</b>	<b>265902.64</b>	<b>321677.01</b>

Sumber: Departemen Keuangan

Dari tabel di atas, terlihat bahwa besar DAU yang diterima oleh suatu wilayah mengalami peningkatan sejalan dengan dimekarkannya daerah tersebut. Untuk Kab. Aceh Selatan, setelah mengalami pemekaran, total DAU yang diterima meningkat sebesar 81 % atau hampir dua kali lipat pada tahun 2005 dibandingkan dengan DAU yang diterima pertama kali pada tahun 2001. Kab. Padang Pariaman mengalami peningkatan DAU sebesar 122 % atau lebih dua kali lipat. Untuk Kab. Musi Banyuasin peningkatan DAU sebesar 43 %, sedangkan besar peningkatan Kab. Bima adalah sebesar 73 %.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa peningkatan DAU daerah – daerah yang dimekarkan rata – rata adalah dua kali lipat. Hal ini menandakan bahwa daerah masih sangat tergantung dengan transfer dari pemerintah pusat ke daerah, terutama dari DAU. Pelaksanaan desentralisasi fiskal, dimana pemerintah daerah mempunyai wewenang yang lebih luas untuk mengelola keuangan daerahnya, ternyata tidak terlepas dari ketergantungan daerah terhadap pusat. Ketergantungan ini pada akhirnya menjadi beban bagi pemerintah pusat terutama dari sisi belanja daerah seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Selain DAU, pemerintah pusat juga membagikan baik penerimaan pajak maupun non pajak kepada daerah sebagai salah satu tujuan diterapkannya desentralisasi fiskal untuk mengurangi kesenjangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Perkembangan dari dana bagi hasil yang ditunjukkan dengan Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) suatu daerah dapat dijelaskan dengan tabel berikut.

**Tabel 5.9.**

**Perkembangan PDS Kab. / Kota yang Dimekarkan Pada Tahun 2002**

	2001	2002	2003	2004	2005
<b>Aceh Selatan</b>	38727.19	69750.247	21134.63	116326.61	66405.46
Aceh Barat Daya				41845.97	48644.48
<b>Padang Pariaman</b>	13678.56	16877.027	34850.21	31134.46	22876.43
Pariaman			1624.126	11400.24	15550.36
<b>Musi Banyuasin</b>	233225.78	331017.65	270081.02	509223.14	689489.91
Banyuasin				102937.52	154028.63
<b>Bima</b>	29575.21	35894.15	46549.67	38148.76	34518.79
Bima			18607.421	19890.91	24706.52

Sumber: Departemen Keuangan

**Tabel 5.10.**

**Pertumbuhan PDS Kab. / Kota yang Dimekarkan Pada Tahun 2002**

	2002	2003	2004	2005
<b>Aceh Selatan</b>	80.106656	-69.69956	450.4076	-42.91464352
Aceh Barat Daya				16.24651072
<b>Padang Pariaman</b>	23.383068	106.49496	-10.66206	-26.52376177
Pariaman			601.93076	36.40379501
<b>Musi Banyuasin</b>	41.930127	-18.40887	88.544584	35.40034925
Banyuasin				49.63312697
<b>Bima</b>	21.365671	29.685947	-18.0472	-9.515302725
Bima			6.8977265	24.21010401

Sumber: Departemen Keuangan

PDS pada penelitian ini dirumuskan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) + Dana Bagi Hasil Pajak + Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Dari Perkembangan PDS dan pertumbuhannya yang tergambar pada tabel di atas, jelas terlihat bahwa PDS dari daerah induk mengalami

trend penurunan. Hal ini berkebalikan dengan trend yang dimiliki oleh DOB yang justru menunjukkan peningkatan yang progressif. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan daerah kepada transfer pemerintah pusat dari dana bagi hasil baik pajak maupun non pajak. Di sisi lain, kondisi ini juga menunjukkan potensi daerah yang masih cukup besar untuk dioptimalkan oleh pemerintah daerah.

Peningkatan PDS dari DOB dan penurunan yang dialami oleh daerah induk menunjukkan bahwa ada beberapa daerah di Indonesia yang mengalami pemekaran untuk meencapai tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Untuk daerah – daerah yang ada pada tabel di atas, terlihat bahwa DOB memutuskan untuk memekarkan diri karena merasa memiliki potensi daerah dan basis pajak yang besar sehingga ketika dimekarkan secara otomatis dana bagi hasil akan diterima oleh DOB lebih besar dibandingkan dengan daerah induknya. Kondisi inilah yang menyebabkan PDS di DOB naik sedangkan di daerah induk justru mengalami penurunan.